

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Transaksi	8
2. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)	9
3. Notaris	10
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kewenangan	12

2. Teori Hierarki Perundang-Undangan.....	15
3. Teori Perlindungan Hukum	17
G. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	20
2. Jenis Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data	25
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	25
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Keuangan	27
1. Pengertian Transaksi Keuangan	27
2. Jenis-Jenis Transaksi Keuangan	30
3. Dasar Hukum Transaksi Keuangan.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	35
1. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris	35
2. Pengertian Umum Terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)	48
3. Latar Belakang Perlunya Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)	58
C. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam Perspektif Islam	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69

A. Regulasi Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa oleh Notaris	69
B. Langkah-Langkah yang Dilakukan oleh Notaris Jika Dalam Pemantauannya Menemukan Data Transaksi Mencurigakan	94
C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Jika Melaporkan Pengguna Jasanya Terkait Temuan Data Transaksi Mencurigakan	111
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	135

DAFTAR SINGKATAN

BO	: <i>Beneficial Owner</i>
CDD	: <i>Customer Due Dilligence</i>
EDD	: <i>Enhanced Due Dilligence</i>
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GRIPS	: <i>Gathering Report Information Processing System</i>
KYC	: <i>Know Your Customer</i>
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perka PPATK	: Peraturan Kepala PPATK
PEP	: <i>Political Exposed Person</i>
PMPJ	: Prinsip Mengenal Pengguna Jasa
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PP Pelapor TPPU	: Peraturan Pemerintah tentang Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang
TKM	: Transaksi Keuangan Mencurigakan
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris
UU TPPT	: Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
UU TPPU	: Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
WC	: <i>Walk in Customer</i>